

BAB II

SEJARAH FIFA DAN SOLIDARITAS EROPA DALAM SEPAK BOLA

Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai latar belakang dan perkembangan tiga prinsip yang menjadi pondasi berdirinya FIFA, khususnya prinsip ‘netralitas politik’ mereka. Bab ini mengupas tuntas tiga prinsip yang menjadi fondasi FIFA, dengan fokus pada prinsip "netralitas politik". Dipaparkan pula fenomena dan periode penting dalam perjalanan FIFA mengembangkan sepak bola di tengah gejolak politik Eropa. Pembahasan secara menagaimana fenomena-fenomena ini memengaruhi pembentukan prinsip, nilai, pandangan, dan standar yang kemudian menjadi landasan identitas kolektif FIFA dan UEFA.

Selanjutnya, bab ini akan menelaah sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Federasi Sepak Bola Rusia atas operasi militernya di Ukraina pada tahun 2022. Berdasarkan argumen penelitian, sanksi ini merupakan bentuk solidaritas Asosiasi Sepak Bola Eropa dan FIFA, yang akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.

2.1. Sejarah Berdirinya FIFA

Menelusuri sejarah FIFA membawa kita kembali ke tahun 1904, tahun dimana FIFA pertama didirikan di kantor pusat dari Française de Sports Athlétiques di Paris, Prancis (FIFA, 2015). Nama FIFA merupakan singkatan dari bahasa Prancis, “Fédération Internationale de Football Association”. Nama dan singkatan bahasa Prancis itu tetap bertahan hingga masa kini, dan tetap berlaku di seluruh dunia. FIFA lahir karena adanya kebutuhan untuk sebuah badan tunggal yang bisa

mengatur permainan sepak bola di seluruh dunia di awal abad ke-20. Pada masa itu jumlah pertandingan sepak bola mulai meningkat. Akhirnya di 21 Mei 1904 sebuah pertemuan untuk menghadirkan Federasi sepak bola internasional dihadiri oleh tujuh asosiasi sepak bola negara Eropa, yaitu Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA) dari Prancis, Union Belge des Sociétés de Sports (UBSSA) dari Belgia, Dansk Boldspil Union (DBU) dari Denmark, Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) dari Belanda, Madrid Football Club dari Spanyol, Svenska Bollspells Förbundet (SBF) dari Swedia, dan Association Suisse de Football (ASF) dari Swiss.

Pertemuan tersebut merupakan sebuah tindak lanjut oleh Robert Guérin, sekretaris departemen sepak bola di USFSA dan seorang jurnalis dari Prancis, yang memanggil perwakilan dari negara-negara tersebut untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk membuat sebuah organisasi payung (FIFA, 2015). Perkumpulan tujuh negara ini kemudian mewujudkan kehadiran FIFA untuk mempromosikan permainan sepak bola dan mendorong hubungan persahabatan antara asosiasi dan konfederasi nasional, beserta pejabat dan pemainnya, juga untuk mengontrol setiap jenis asosiasi sepak bola (US Soccer, n.d.). Pada saat itu, Statuta awal FIFA hanya mengandung beberapa pasal, yaitu : Hanya Asosiasi Nasional yang diwakili oleh FIFA yang akan diakui; Klub dan pemain hanya dapat bermain untuk dua Asosiasi Nasional pada waktu yang sama; Pertandingan harus dimainkan sesuai dengan “Aturan Permainan dari Football Association Ltd.”; Setiap Asosiasi Nasional akan membayar biaya tahunan sebesar 50 franc Prancis; Hanya FIFA yang dapat mengatur pertandingan internasional (FIFA, 2015).

Guerin kemudian menjabat sebagai Presiden FIFA yang pertama dari tahun 1904 hingga 1906. Dibawah ini terlampir tabel untuk melihat daftar Presiden FIFA dari awal berdirinya FIFA hingga masa kini, asal negara, dan periode tahun kepresidenan mereka. Dari tabel dibawah, terlihat bahwa mayoritas Presiden FIFA bernasionalitas Eropa, kecuali João Havelange yang bernasionalitas Brazil. Masa kepresidenan terpanjang dimiliki oleh Jules Rimet dari Prancis yang juga dinobatkan sebagai “Honorary FIFA President” atas prestasi dan kemajuan yang ia bawakan untuk FIFA selama masa jabatannya. Tidak hanya Rimet, tetapi gelar “Honorary FIFA President” juga diberikan kepada Sir Stanley Rous dan João Havelange (FIFA, 2021).

Tabel 2.1.

Daftar Presiden FIFA

No.	Periode	Nama	Asal Negara
1.	1904 - 1906	Robert Guerin	Prancis
2.	1906 - 1918	Daniel Burley Woolfall	Inggris
3.	1921 - 1954	Jules Rimet	Prancis
4.	1954 - 1955	Rodolphe William Seeldrayers	Belgia
5.	1955 - 1961	Arthur Drewry	Inggris
6.	1961 - 1974	Sir Stanley Rous	Inggris
7.	1974 - 1998	João Havelange	Brazil
8.	1998 - 2015	Joseph Blatter	Swiss
9.	2016 - Hari ini	Gianni Infantino	Italia

Sumber : FIFA.COM

FIFA hadir di pergantian abad ke-20 dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan untuk menstimulasi kompetisi dan menggelar acara mereka sendiri. Dari awal, kompetisi adalah esensi dari kegiatan olahraga, melalui kompetisi, olahraga tertanam dalam semangat zaman, dan memberikan ekspresi untuk berjuang untuk kemajuan, kesetaraan sosial dan, penerimaan dari hubungan antar komunitas olahraga dan juga antar negara secara umum. Dengan pelaksanaan pertandingan sepakbola yang terjadi secara berkala, mereka secara serentak memberikan masyarakat di abad ke-20 sebuah impresi langsung yang disebut Charles Baudelaire sebagai “modernitas”, sebuah ekspresi dari “...*the temporary, the fugitive, the contingent,*” yang dari perspektif yang berlawanan bisa dilihat sebagai “*the eternal and unchanging*” (Baudelaire, 1964: 12).

Baudelaire menunjukkan bahwa turnamen olahraga modern memang rumit. Publik sering melupakan fakta bahwa olahraga internasional, seperti budaya lainnya, dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, dan budaya, dan bahkan terkadang bisa mendorong perubahan itu sendiri. Reaksi khas dari ilusi ini dapat terlihat dari pejabat olahraga yang menganggap tujuan mereka sebagai konstan dan tidak berubah, dengan alasan ini, mereka memfokuskan pemikiran mereka dengan idealisme Olympic tentang kompetisi olahraga (Eisenberg, 2005: 402).

Pembahasan selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana prinsip konstan dan tidak berubah FIFA, sebagai badan olahraga yang telah terjerat dalam hubungan politik, ekonomi dan budaya dunia, yaitu prinsip keanggotaan (membership), prinsip pemungutan suara (voting), dan prinsip tingkah laku (principle of conduct).

2.1.1. Prinsip Keanggotaan FIFA (*Membership Principle*)

FIFA menganut prinsip keanggotaan “*One Country – One Association*”, yang berarti, suatu negara hanya boleh mempunyai satu asosiasi sepakbola yang mengatur seluruh aktifitas sepakbola negara tersebut dan mengantongi keanggotaan FIFA (FIFA, 2015). Pada awal abad ke-20, ada banyak asosiasi dan pergerakan yang berkontestasi untuk kepentingan olahragawan, mendapat biaya keanggotaan, dan perhatian publik. Dengan kondisi seperti ini, banyak asosiasi nasional mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan keanggotaan dibawah payung organisasi internasional untuk menguatkan posisi mereka di rumah (Eisenberg, 2005: 403). Organisasi payung internasional seperti FIFA hadir untuk menawarkan anggota baru mereka sebuah jaminan untuk hak representasional yang eksklusif dalam disiplin sepak bola tingkat internasional. Ini merupakan sebuah penawaran yang sangat menarik karena status keanggotaan dapat menaikkan status mereka lebih tinggi dari organisasi rival di negara mereka sendiri.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sekretaris FIFA dalam FIFA 1904-1929 Commemorative Book, Carl Wilhelm Hirschman, yang menuliskan bahwa:

“Moral assistance of the Federation, helped our members to overcome troubles which would have harmed them without that help, but also such troubles have been prevented because it was felt that the revolution could not succeed against the wishes of the combined Associations forming the Federation.” (FIFA, 1929: 31)

Namun Hirschman gagal untuk menyebutkan dimensi ideologis dan politis yang mengakar dalam konflik seperti itu. Di banyak negara, rival FIFA termasuk dari organisasi olahraga gereja atau organisasi yang dekat kaitannya dengan pergerakan buruh Sosialis. Sebagai contoh, *Union Royale Belge des Sociétés de*

Football Association di Belgia, mempunyai rival, yaitu asosiasi sepak bola Katolik. Organisasi olahraga yahudi dan kelas pekerja juga hadir di Jerman, Austria, dan negara-negara Eropa Tengah lainnya, juga Rusia. Walaupun organisasi-organisasi tersebut mengalami diskriminasi politik di negara mereka, kesempatan mereka untuk mendapatkan dukungan dari FIFA sangatlah minim (Eisenberg, 2005: 403).

Tidak hanya karena pandangan dan tujuan politis dan filosofis mereka dianggap berkontradiksi dengan pendirian eksplisit FIFA perihal netralitas, namun asosiasi olahraga multidisiplin ini juga baru mengadopsi sepakbola dalam agenda mereka setelah asosiasi olahraga sepakbola telah bergabung dengan FIFA. Seperti contohnya, *Arbeiter-Turner-Bund* adalah organisasi olahraga nasional sosial demokratik Jerman yang aktif antara tahun 1893-1933 yang pada saat itu tidak tertarik pada sepak bola (Filter, 1988: 55). Di tahun 1900 *Deutscher Fußball-Bund* lahir sebagai asosiasi sepak bola Jerman dan mereka telah bergabung dengan FIFA di tahun 1904, sementara *Arbeiter-Turner-Bund* baru menerima sepak bola setelah berakhirnya Perang Dunia I (Filter, 1988: 56).

Dari awal, seluruh anggota asosiasi FIFA dilarang, dengan resiko sanksi pengusiran, untuk terlibat dalam kompetisi olahraga dengan non-anggota, organisasi olahraga multidisiplin dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan pemerintah dan pejabat dalam banyak negara ingin menghambat pertumbuhan organisasi olahraga yang berlandaskan ideologi politik dan religi. Jaminan status monopoli representasi oleh FIFA kepada anggotanya memperkuat hubungan kekuatan domestik di antara beragam badan olahraga, karena beberapa badan ini berafiliasi

dengan partai politik, mereka terkadang terlibat dalam perebutan kekuasaan politik (Eisenberg, 2005: 403).

Sebagai konsekuensi, jaminan monopoli representasi dari anggota asosiasi olahraga internasional membantu untuk melebarkan jarak antara asosiasi netral politik dan asosiasi sosialis atau religi. Setelah pengaruh Fasisme dan Perang Dunia II mengakhiri organisasi olahraga buruh sosialis dan komunis, perpecahan politik dalam olahraga dunia menghilang. Setelah tahun 1945, gerakan olahraga kelas pekerja independen di sebagian besar negara dan disiplin olahraga tidak dihidupkan kembali, sehingga klub-klub agama yang tersisa bergabung ke dalam gerakan olahraga umum, sebuah perkembangan yang dicatat dengan kepuasan oleh pejabat FIFA (Eisenberg, 2005: 404).

Sistem monopoli perwakilan yang mendominasi olahraga internasional sebelum 1945 ternyata memiliki efek yang kurang baik. Hal ini membatasi kemampuan FIFA berkembang secara maksimal, dan bahkan terkadang memaksa mereka untuk ikut campur kebijakan olahraga negara-negara Eropa. Namun di sisi lain, tanpa adanya sistem perwakilan tunggal ini, sulit untuk membayangkan bagaimana FIFA dapat menjalankan tanggung jawab global mereka secara efektif.

2.1.2. Prinsip Pemungutan Suara (*Voting*) FIFA

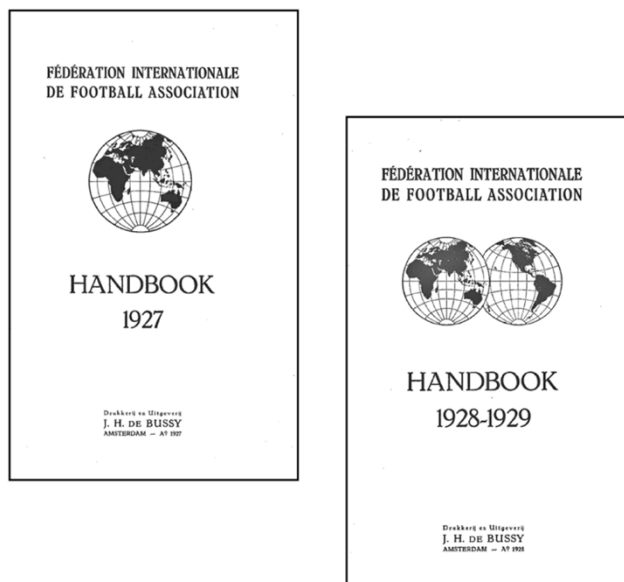
Dibandingkan dengan sistem monopoli perwakilan, prinsip "*one country, one vote*" terbukti lebih efektif dan dinamis. Pada masa sebelum Perang Dunia Pertama, pemungutan suara demokratis menjadi satu-satunya cara yang memungkinkan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam

pertemuan internasional (Eisenberg, 2005: 404). Mempertimbangkan hubungan yang tidak selalu harmonis antar negara anggota, asosiasi yang menerapkan sistem pemungutan suara dengan motif lain hanya akan merugikan olahraga. Namun, pada awalnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi "negara", apakah merujuk pada negara independen atau sebuah bangsa. Di FIFA, hal ini tidak menjadi masalah besar karena empat asosiasi sepak bola Britania Raya (Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia) secara bulat diberikan status khusus sebagai pionir (Eisenberg, 2005: 58).

Penerapan prinsip "satu negara, satu suara" menimbulkan dilema bagi negara-negara Eropa dan asosiasi sepak bola mereka, terutama di tengah situasi politik yang kompleks. Negara seperti Finlandia dan Bohemia, yang merupakan wilayah dependen dari kekaisaran Rusia dan Austria-Hongaria, menginginkan pengakuan sebagai peserta independen dalam olahraga internasional. FIFA sempat mengakui FC Prague yang mewakili Bohemia, namun pada Kongres Wina 1909, asosiasi Austria berhasil mengeluarkan Praha dengan argumen bahwa Bohemia hanyalah wilayah kekaisaran. Menariknya, Austria tidak keberatan dengan keberadaan asosiasi Hongaria di FIFA, meskipun Hongaria juga merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Setelah perdebatan yang sengit, prinsip "satu negara, satu suara" akhirnya diterima dengan kesepakatan bahwa kata "negara" diinterpretasikan sebagai "negara bagian" (Eisenberg, dkk., 2005: 62; Keys, 2001: 76)

Penyebaran sepak bola yang masif ke seluruh dunia membuka peluang bagi koloni dan wilayah dependen untuk memanfaatkan prinsip "satu negara, satu suara"

untuk mendapatkan keanggotaan di FIFA. Praktik ini umum dilakukan selama periode antara dua perang dunia, di mana koloni dapat diterima sebagai anggota terafiliasi tanpa hak suara, dengan persetujuan negara induk mereka. Beberapa negara yang diuntungkan oleh aturan ini termasuk Kongo Belgia, Aljazair, Maroko, Somalia, Angola, dan Mozambik di Afrika; Guyana Prancis di Amerika Selatan; Indocina di Asia; dan sebagian Oseania di Pasifik Selatan (Eisenberg, 2005: 405).



Gambar 2.1

Perubahan Logo FIFA dalam Handbook 1927 dan 1928-1929

Sumber : FIFA Museum Library

Celah hukum yang tercipta dari prinsip "satu negara, satu suara" terbukti sangat bermanfaat setelah Perang Dunia Kedua. Ini memungkinkan FIFA untuk memfasilitasi masuknya negara-negara yang baru dibentuk, seperti negara-negara yang muncul dari kekalahan Kekaisaran Jerman. Fleksibilitas ini memungkinkan FIFA untuk mengakomodasi berbagai bentuk transisi politik antara ketergantungan

dan kemerdekaan yang muncul selama periode dekolonisasi pasca perang. Bahkan sebelum PBB mengeluarkan *"Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples"* di tahun 1960 (Strang, 1990), FIFA sudah memberikan keanggotaan kepada banyak negara yang baru merdeka. Beberapa contoh negara yang bergabung dengan FIFA sebelum resolusi PBB disahkan adalah Kenya, Lesotho, Mauritius, Nigeria, Sudan, Uganda, Siprus, Malaysia, Singapura, dan Suriah (Eisenberg, 2005: 406).

Dekolonisasi cepat yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, salah satu perkembangan global terpenting pasca 1945, tercermin dalam statistik keanggotaan FIFA. Lebih dari seratus bekas koloni, wilayah yang memisahkan diri, dan berbagai entitas politik lainnya menjadi negara-bangsa merdeka (Meyer, dkk., 1997). Setelah terbentuknya negara baru, asosiasi sepak bola negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi anggota penuh melalui proses administratif yang sederhana. Negara-negara yang baru merdeka dengan antusias memanfaatkan kesempatan ini karena partisipasi dalam turnamen sepak bola internasional menjadi bukti nyata keberadaan mereka. Selama dua dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua, keanggotaan FIFA meningkat lebih dari 100% (lihat di bawah).

Tabel 2.2
Anggota FIFA, 1904-1964

Periode	Jumlah Anggota Baru	Total jumlah anggota diakhir periode	Pertumbuhan sejak 1945
1904-1944	60	60	
1945-1949	8	68	
1950-1954	12	80	+33%
1955-1959	11	91	+50%
1960-1964	32	123	+103%

Sumber : Eisenberg, 2005: 406

Sedangkan pada tahun 2024, FIFA telah memiliki 211 asosiasi anggota di seluruh dunia (FIFA, n.d.), yang berarti ada kenaikan persentase sebesar 250% dari awal dibentuknya. Keanggotaan FIFA pasca Perang Dunia Kedua tumbuh pesat, bahkan dua kali lipat dibanding empat dekade awal. Ini memicu perubahan organisasi yang signifikan. Banyak negara dan asosiasi sepak bola baru bermunculan, mengubah struktur kekuatan FIFA. Pada 1955, asosiasi sepak bola Eropa hanya 42% dari total anggota, menjadi minoritas di organisasi mereka sendiri. Tren ini berlanjut. Contohnya, pada 1957, 31 dari 43 anggota baru FIFA berasal dari Afrika (Darby, 2005: 885).

Pada 1960, Italia mengangkat sebuah proposal untuk hak suara berdasarkan aktivitas sepak bola dan prestasi tim nasional yang kemudian ditolak mayoritas. Koalisi negara Amerika Selatan, Afrika, dan Asia yang memimpin penolakan tersebut (Eisenberg, 2005: 407). Pergeseran kekuatan dalam FIFA mencapai puncaknya pada pemilihan tahun 1974. Pengusaha Brasil, João Havelange, terpilih sebagai presiden, menggantikan Sir Stanley Rous dari Inggris. Pandangan dan sikap

kolonial Rous membuatnya tidak disukai negara-negara Dunia Ketiga (Eisenberg dkk., 2005: 222; Sugden & Tomlinson, 1998).

Kemenangan Havelange menandai era baru dalam politik FIFA. Negara-negara Amerika Selatan dan negara muda di Afrika dan Asia yang gemar sepak bola mulai menuai keuntungan. Sejak 1972, mereka menafsirkan ulang Pasal 2 dalam statuta FIFA "untuk mempromosikan permainan sepak bola dengan segala cara yang dianggap pantas" dan mengklaim "hak [negara-negara Dunia Ketiga] untuk mendapatkan bantuan keuangan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata benua kami" (Darby, 2002). Untuk memenuhi tuntutan ini, Havelange dan rekan fungsionarisnya mulai melibatkan staf profesional yang semakin banyak dalam transformasi FIFA menjadi bisnis dalam skala global dengan basis keuangan yang sangat luas (Eisenberg dkk., 2005: 230). Awalnya, mereka menandatangani kontrak sponsor dengan Coca-Cola, Adidas, dan perusahaan lain. Kemudian, mereka menambahkan penjualan pernak-pernik resmi FIFA. Akhirnya, mulai tahun 1980-an, organisasi ini meraup pendapatan tinggi dari hak siar Piala Dunia (Eisenberg, 2005: 407; Eisenberg dkk., 2005: 231).

Mereka kini bisa membangun markas, mempekerjakan staf profesional, dan mendorong tim mereka berlaga di kompetisi internasional. Kebijakan baru bernama GOAL yang diperkenalkan pada tahun 2000 semakin menekankan hal ini. Dana pengembangan kini diberikan langsung ke asosiasi sepak bola. Tujuannya adalah untuk memberdayakan asosiasi sepak bola negara Dunia Ketiga agar siap menjadi tuan rumah turnamen internasional (Eisenberg dkk., 2005: 236).

2.1.3. Prinsip Netralitas Politik

Prinsip organisasi ketiga FIFA adalah netralitas politik. Prinsip ini memegang peranan penting dalam konteks monopoli representasi dan menjadi prasyarat untuk pertumbuhan berkelanjutan serta perluasan wilayah operasional FIFA. Prinsip "tanpa politik" berasal dari para "penemu" olahraga modern Inggris. Kegiatan mereka pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 bertujuan utama untuk mendorong kebersamaan sosial (Eisenberg, 2005: 408). Tujuan ini hanya bisa tercapai jika semua peserta bersedia mengesampingkan perbedaan politik dan pendapat lain di luar lapangan. Di tingkat nasional, prinsip "tanpa politik" bertujuan mencegah masuknya politik partai, konflik agama, atau kelas ke arena olahraga. Sedangkan di tingkat internasional, prinsip ini bertujuan menjaga jarak dari konflik antar negara. Para pendiri FIFA percaya bahwa prinsip ini harus ditegakkan untuk menyukseskan dan mempertahankan sportivitas internasional.

Sebagai contoh, hampir tidak mungkin menggelar pertandingan sepak bola antara Prancis dan Jerman kecuali kedua tim tersebut secara sadar mengabaikan fakta bahwa kedua negara tersebut memiliki sejarah permusuhan yang panjang. Oleh karena itu, ketika para pendiri FIFA berulang kali menyatakan kepada diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka "hanya memiliki satu tanah air dan satu ayah, yaitu dunia dan sepak bola" (FIFA, 1929). Menerima gagasan bahwa "olahraga apolitis" adalah hal yang ideal, bukan berarti bersikap naif atau tidak peduli dengan politik. Justru, gagasan ini mengakui bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu terlebih dahulu menerimanya.

Satu-satunya cara bagi organisasi ini untuk bertahan dari konflik kepentingan antar negara adalah dengan menegaskan bahwa "olahraga apolitis" adalah realita. Namun, ide ini menjadi terlalu ekstrem ketika Perang Dunia I pecah dan organisasi olahraga mulai bekerja sama dengan otoritas militer di banyak negara Eropa. Pertandingan sepak bola dan kompetisi olahraga lainnya diadakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di medan perang atau, lebih tepatnya, di belakang garis depan dan selama gencatan senjata sementara (Mennel, 1989; Winter, 1979)

Dalam situasi di mana perang telah menjadi jalan terakhir politik, kegiatan olahraga itu sendiri menjadi subjek perselisihan politik. Gerakan olahraga internasional pun terhenti selama Perang Dunia I. Bahkan beberapa pejabat organisasi olahraga internasional, termasuk Pierre de Coubertin dan rekan-rekannya di IOC, mulai meragukan kelangsungan tujuan mereka (Boulongne, 1994). Olahraga internasional memiliki masa depan karena sikap yang tampaknya naif terhadap politik menjadi jelas kembali. Setidaknya selama periode antara dua perang dunia, keinginan untuk menjauhi politik dianggap sebagai elemen alami dalam kode etik olahraga. Alasan pertama adalah aspirasi luas untuk mempertahankan hubungan dengan Jerman dan Austria-Hongaria, negara penyerang dan kalah dalam Perang Dunia I.

Secara praktis, mengeluarkan mereka secara permanen tidak mungkin dilakukan karena status mereka dalam olahraga Eropa saat itu terlalu penting. Austria dan Hungaria dianggap sebagai kekuatan sepak bola utama Eropa pada tahun 1920-an dan merupakan lawan yang menarik. Untuk mempertahankan

mereka di FIFA, para pejabat bahkan rela menerima pengunduran diri Asosiasi Sepak Bola Inggris yang menentang kebijakan penerimaan yang longgar (Eisenberg, 2005: 409). Alasan kedua untuk menghidupkan kembali prinsip "tanpa politik" adalah pertumbuhan gerakan Fasis nasional yang - seperti olahraga itu sendiri - telah membangun jaringan internasional di seluruh Eropa. Bahkan di beberapa negara, partai Fasis berkuasa. Para pejabat FIFA, bersikap kooperatif menjadi lebih mudah karena beberapa di antaranya sendiri bersimpati pada ideologi Fasis dan membantu membuka gerakan politik ini ke dalam olahraga (Foot, 2006; Martin, 2004)

Dengan cara ini, pejabat puncak FIFA dan eksekutif utama organisasi olahraga lainnya berhasil menghindari revisi rencana jangka panjang untuk acara olahraga utama. Ini berlaku untuk Olimpiade 1936 di Berlin yang diberikan kepada Jerman sebelum Nazi berkuasa pada tahun 1933, dan Piala Dunia Sepak Bola kedua (dan pertama di Eropa) yang berlangsung di Italia di bawah kediktatoran Fasis lainnya pada tahun 1934. Para pejabat FIFA, bekerja sama dengan rezim Fasis dianggap sebagai bentuk kesuksesan internasional walaupun mengabaikan dasar-dasar politik yang mungkin ada (Eisenberg, 1999; Eisenberg dkk., 2005). Namun, kebijakan ini menjadi terlalu berlebihan bagi sebagian kecil pejabat yang menentang propaganda yang melampaui batas dalam acara-acara tersebut. Presiden FIFA, Jules Rimet, misalnya, tetap duduk saat final Piala Dunia di Roma ketika tim Italia yang menang memberi hormat ala Fasis kepada "Il Duce" (pemimpin Fasis Italia) Benito Mussolini (Eisenberg dkk., 2005: 275).

Namun, ketika Perang Dunia II pecah, Rimet, seorang pendukung gerakan perlawanan Prancis (French Resistance), juga terpaksa tunduk pada kekuatan normatif realitas. Bersama dengan sekretaris jenderalanya, Ivo Schricker, seorang liberal sayap kiri yang juga menentang Jerman Nazi, Rimet memutuskan, dalam tradisi birokrasi terbaik, untuk mengecualikan semua asosiasi sepak bola Eropa dari keanggotaan FIFA, seperti Norwegia, yang telah dibubarkan oleh Nazi dan digantikan dengan yang baru (Eisenberg dkk., 2005: 280). Ambivalensi prinsip "tanpa politik" bagi gerakan olahraga internasional selama periode antara dua perang dunia adalah jelas. Di satu sisi, ada risiko bagi organisasi olahraga terlibat dalam aktivitas politik yang dapat dipertanyakan. Dalam konteks ini, tindakan mereka yang dengan sengaja mengabaikan realitas sebenarnya sebanding dengan pengakuan bahwa moralitas mereka telah runtuh.

Di sisi lain, tanpa prinsip "*no politics*", FIFA tidak akan seberhasil itu dalam mengorganisir kegiatan olahraga internasional atau mencapai representasi global. Contoh lain dari penyalahgunaan ide ambivalen di balik prinsip ini setelah tahun 1945 termasuk konflik-konflik yang timbul akibat pembagian negara-negara selama Perang Dingin, intervensi Uni Soviet dalam kegiatan olahraga di Hongaria dan Cekoslovakia pada tahun 1956 dan 1968 secara berturut-turut, boikot berulang Olimpiade, dan malu politik yang disebabkan oleh pejabat FIFA di Afrika Selatan, di Chili di bawah Pinochet, dan di Argentina selama kediktatoran militer (Eisenberg dkk., 2005: 283). FIFA telah menunjukkan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi prinsip netralitas politik mereka. Keinginan FIFA adalah untuk bisa sesuai dengan kebenaran politik.

Hal tersebut merupakan alasan utama mengapa mereka bekerja sama dengan UNESCO, UNICEF, dan organisasi di bawah naungan PBB lainnya yang standar politiknya mereka terapkan sendiri pada FIFA. Tentu saja, FIFA sejak itu telah mendorong kebijakan anti-rasisme. Hal ini termanifestasi dalam perubahan sikap dan kebijakan FIFA dalam Statuta mereka (FIFA, n.d.).

2.2 Sejarah Politisasi Sepak Bola di Eropa

Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh FIFA dan UEFA mempengaruhi pembuatan keputusan dan penegakan prinsip “netralitas politik” mereka. Beberapa peristiwa politik yang terjadi di Eropa sejak kelahiran FIFA menaruh FIFA dalam posisi dimana mereka tidak punya pilihan untuk membiarkan asosiasi sepak bola Eropa mempolitisasi sepak bola, yang sebenarnya berlawanan dengan prinsip netralitas politik mereka. Penulis akan berusaha menjelaskan bahwa ini disebabkan identitas kolektif yang dimiliki oleh FIFA dan UEFA. Sub-bab ini akan mempermudah pembahasan di bab selanjutnya yang akan membahas bagaimana interaksi sosial FIFA dan UEFA menghasilkan kepentingan kolektif.

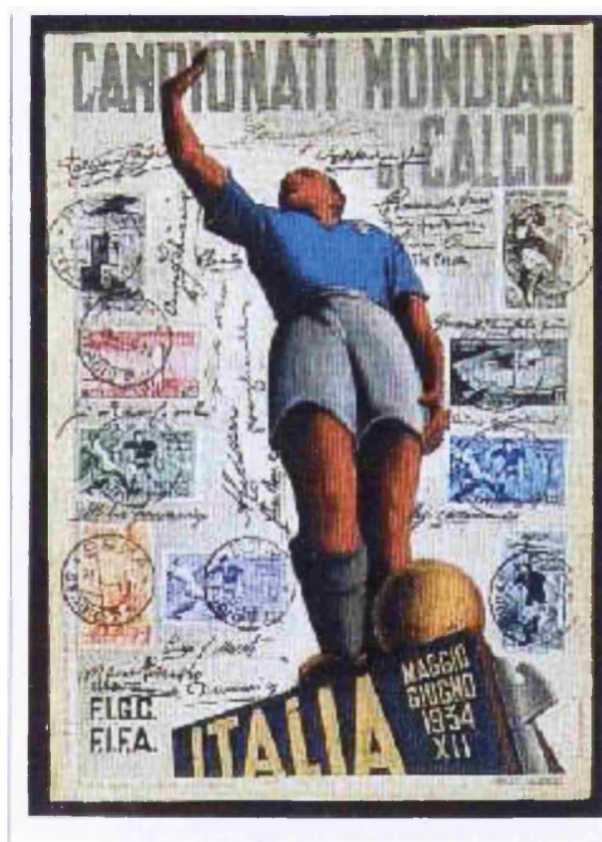
Sejalan dengan argumen penulis, identitas kolektif FIFA dan UEFA adalah akibat sejauh mana identitas sosial FIFA melibatkan identifikasi dengan nasib UEFA. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh dan di Eropa, FIFA memulai perjalanannya sebagai organisasi olahraga internasional yang dijalankan oleh nilai dan ideologi Eurosentris. Hal ini menyebabkan FIFA mengidentifikasikan diri dengan UEFA yang kemudian menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kesejahteraan mereka bersama (baik secara individual atau sebagai kelompok).

Berdasarkan gagasan Alexander Wendt mengenai identitas kolektif, identifikasi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat berkisar dari negatif (melihat orang lain sebagai berlawanan dengan diri sendiri) hingga positif (melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri (Wendt, 1994: 386).

2.2.1. Propaganda Fasis dan Nazi dalam Sepak Bola

Prinsip netralitas FIFA menghadapi tantangan berat selama kebangkitan fasisme di Eropa. Para pemimpin fasis, seperti Benito Mussolini, Adolf Hitler, dan Francisco Franco, menyadari kekuatan olahraga, khususnya sepak bola, untuk mempromosikan ideologi mereka dan memperkuat kekuasaan rezim mereka (Armstrong & Mitchell, 2011: 304). Ideologi fasis memandang olahraga sebagai pertunjukan teater, sebuah tontonan yang diatur dengan hati-hati untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesehatan jasmani, dan menanamkan rasa persatuan kolektif. Olahraga, menurut para pemimpin fasis, dapat dibentuk menjadi alat propaganda yang ampuh, untuk memamerkan kekuatan dan pencapaian rezim mereka (Matsaridis & Kaimakamis, 2012: 118)

Italia di bawah Mussolini memberikan contoh nyata dari hubungan erat fasisme dengan olahraga. Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1934, yang digunakan Mussolini sebagai panggung untuk menampilkan keunggulan rezim Fasis (Goldblatt, 2008; Hunt, 2006). Delapan kota terpilih dengan stadion yang dibangun dengan gaya arsitektur fasis yang monumental, dihiasi dengan elemen-elemen budaya Italia, dan berfungsi sebagai "kuil" tempat pertandingan sepak bola digelar (Matsaridis & Kaimakamis, 2012: 120).



Gambar 2.2

Poster Piala Dunia 1934, menampilkan seorang pria melakukan salam Fasis dengan fasces yang menancap di podium, juga angka romawi XII.

Sumber : (Martin, 2004:188)

Film dan poster propaganda membanjiri Italia, menghubungkan sepak bola dengan identitas Fasis. Sekitar 100.000 poster, 300.000 kartu pos, dan satu juta perangko dicetak untuk Piala Dunia tahun itu, menampilkan gambar para pemain sepak bola dengan salam fasis dan tahun 1934 dituliskan sebagai tahun XII era fasis (Gentile, 2001; Matsaridis & Kaimakamis, 2012: 119).



Gambar 2.3

Poster Piala Dunia 1934 dengan Fasces dan angka romawi XII

Sumber : Situs Resmi FIFA Store, 2023

Bahkan, salah satu poster karya seniman Filippo Tommaso Marinetti (Gambar 2.2) masih dijual di situs resmi FIFA Store. Meskipun menyatakan komitmen terhadap netralitas politik, FIFA membiarkan sepak bola digunakan untuk tujuan politik selama era ini. Keputusan FIFA untuk memberikan Piala Dunia 1934 ke Italia, negara di bawah kekuasaan Fasis, menimbulkan pertanyaan tentang ketidakberpihakannya (Tomlinson dkk., 2006). Kemenangan tim nasional Italia di Piala Dunia 1934 menjadi buah ceri di atas es krim. Citra sepak bola Italia pada dekade tersebut mencapai status legenda, dan rezim Mussolini mendapat kredit untuk itu. Segala pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Mussolini seakan

dikesampingkan karena mereka berhasil menyelenggarakan Piala Dunia 1934 dengan sukses, dan FIFA tidak mengambil tindakan apa-apa atas hal tersebut.

Kemenangan tim nasional Italia di Piala Dunia 1934 menjadi buah ceri di atas es krim. Citra sepak bola Italia pada dekade tersebut mencapai status legenda, dan rezim Mussolini mendapat kredit untuk itu. Segala pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Mussolini seakan dikesampingkan karena mereka berhasil menyelenggarakan Piala Dunia 1934 dengan sukses, dan FIFA tidak mengambil tindakan apa-apa akan itu. Tahun 1938, FIFA masih membiarkan sepak bola menjadi lapangan propaganda fasisme saat mereka membiarkan Nazi Jerman bertanding di Piala Dunia. Sebuah film dokumenter oleh BBC, berjudul *“Football and Fascism”* mengupas bagaimana sepak bola menjadi panggung eksploitasi bagi rezim fasis. Hitler, misalnya, memandang sepak bola sebagai alat propaganda untuk memamerkan superioritas ras Arya.

Hal tersebut terlihat dari upaya Jerman merekrut pemain Austria yang baru saja mereka caplok untuk memperkuat tim nasional mereka di Piala Dunia 1938. (Garlund, 2003). Ironisnya, tindakan ini justru menuai perlawanan. Penolakan legendaris pemain Austria, Matthias Sindelar, untuk bermain bagi Jerman menjadi simbol perlawanan terhadap fasisme (FIFA, 2023). Piala Dunia 1938 di Prancis pun tak luput dari agenda terselubung Hitler. Turnamen ini digunakan sebagai kedok untuk menutupi niatnya memulai perang (Garlund, 2003). Jerman dan Italia, negara-negara fasis, berpartisipasi dalam ajang ini. Kemenangan Italia, meski bukan juara, seakan menjadi penegasan dominasi fasisme kala itu, tak hanya di ranah politik, tetapi juga di lapangan hijau (Garlund, 2003).

Perlu dicatat bahwa eksploitasi sepak bola oleh rezim fasis ini terjadi bersamaan dengan pelanggaran berat yang dilakukan Jerman terhadap Traktat Versailles (*Treaty of Versailles*). Traktat ini ditandatangani oleh negara-negara sekutu dan Jerman pada tahun 1919, dan mulai berlaku pada 1920. Traktat tersebut berisi sanksi bagi Jerman yang kalah perang, termasuk pembatasan militer dan wilayah (Lee, 1996: 94). Dalam iklim politik yang tidak menentu saat itu, sepak bola justru dipromosikan sebagai sarana pemersatu. Dua bulan sebelum Piala Dunia 1938, tim nasional Inggris bertandang ke Berlin untuk melakoni pertandingan persahabatan melawan Jerman (Garlund, 2003). Disaksikan oleh lebih dari 100.000 penonton, bendera Inggris dan Swastika dikibarkan berdampingan di Stadion Olimpiade Berlin. Namun, momen yang paling kontroversial terjadi sebelum peluit dibunyikan. Para pemain Jerman dan Inggris sama-sama mengangkat tangan kanan mereka dalam gestur salut Nazi (Carter, 2018). Kemenangan Inggris 6-3 pada pertandingan tersebut seolah tertutupi oleh sorotan terhadap aksi kontroversial ini.



Gambar 2.4

Tim nasional Inggris dan Jerman melakukan salam Fasis
di Stadion Olympic Berlin, 1938

Sumber : BBC News Online, 2003.



Gambar 2.5

Tim Nasional Italia dengan kaos Away mereka yang berwarna hitam di Piala
Dunia 1938 di Prancis.

Sumber : The Guardian, 2018

Menurut sejarawan Simon Carter (2018), arahan untuk melakukan salut Nazi berasal dari *British Foreign Office*. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk "meredakan" Hitler (Duffy, 2003). Di sisi lain, kekalahan Jerman tidak terlalu menjadi masalah bagi Hitler. Tujuan utamanya adalah dampak propaganda dari pertandingan tersebut. Ia menggunakan kekalahan Jerman untuk meyakinkan masyarakat Inggris bahwa Jerman bukanlah negara agresor. Faktanya, pertandingan ini secara tidak langsung melegitimasi rezim Hitler. Pemerintah Inggris, dengan arahan untuk melakukan salut Nazi, seolah berkolusi dengan Nazi Jerman dan menegaskan kebijakan appeasement di lapangan sepak bola (Garlund, 2003).

2.2.2 FIFA untuk Dunia : Penyebaran Nilai-Nilai Eropa dalam Sepak Bola Kancan Internasional

Dunia mengalami banyak perubahan pasca Perang Dunia II, hal ini ditandai dengan kemunculan berbagai gerakan advokasi domestik maupun transnasional dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) dalam lingkup kemanusiaan, lingkungan, sosial dan budaya yang menuntut pertanggungjawaban aktor-aktor negara dan swasta untuk mulai mengadopsi kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai HAM, pelestarian lingkungan, pembangunan keberlanjutan, kesetaraan sosial, gender dan budaya. Organisasi olahraga internasional seperti FIFA dan asosiasi negara-negara anggotanya juga tidak luput dari tuntutan tersebut.

Maka dari itu, FIFA harus mengubah cara mereka dalam menjalankan tata kelolanya terhadap sepak bola dunia untuk memastikan bahwa praktik sepak bola sesuai dengan nilai-nilai positif. Mantan presiden FIFA Jules Rimet sendiri

menganggap FIFA sebagai versi olahraga dari Liga Bangsa-Bangsa, yang didirikan di Jenewa pada tahun 1920. Ia merangkum visinya tentang FIFA dalam pidatonya di kongres tahun 1950, di mana ia mengusulkan bahwa ambisi federasi seharusnya adalah untuk menggerakkan kualitas manusia yang ideal yang ditunjukkan dalam lapangan sepak bola ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia melihat bahwa peradaban seharusnya dapat menjadi refleksi seperti tim sepakbola yang bersatu dan setia (Vonnard & Quin, 2018).

FIFA berusaha untuk menjalankan pemerintahan global mereka mengikuti dengan perkembangan tersebut. Contohnya di tahun 1955 (Pemerintahan presiden Rodolphe William Seeldrayers), FIFA pernah menarik keanggotaan South African Football Association (SAFA) yang pada saat itu hanya merepresentasikan atlet sepakbola kulit putih karena kebijakan rasialnya untuk memisahkan asosiasi sepakbola kulit putih dan kulit hitam (South African History Online, 2019). Namun, itu menjadi terakhir kalinya FIFA menjatuhkan hukuman kepada asosiasi sepakbola suatu negara karena kegagalan etis mereka selama 6 dekade kebelakang.

Kemudian di tahun 1990-an, ada Yugoslavia yang menerima sanksi dari FIFA dan UEFA atas perseteruan mereka dengan masyarakat bekas Republik Bosnia-Herzegovina, yang mengakibatkan mereka didiskualifikasi dari Piala Eropa 1992, meskipun mereka telah mencapai tingkat final pada ajang tersebut. Tidak hanya itu, Yugoslavia juga dilarang untuk ikut serta dalam ajang Piala Dunia 1994 oleh FIFA (Mansoor, 2022).

Pada September 2022, Komite Etik FIFA telah melarang Obert Zhoya, mantan Sekretaris Jenderal dari Komite Wasit dari Zimbabwe Football

Association (ZIFA) untuk berpartisipasi lagi dalam segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan sepak bola dalam durasi 5 tahun. Larangan ini dijatuhkan pada Zhoya setelah ditemukan bukti bahwa ia menyalahgunakan posisinya untuk melecehkan 3 wasit perempuan ZIFA secara seksual (FIFA, 2022).

Usaha-usaha FIFA untuk memberikan asistensi moral ini juga dirasakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menerima kunjungan dari perwakilan dari FIFA di Indonesia, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino pada tanggal 18 Oktober 2022. Kunjungan itu dilaksanakan setelah tragedi di Stadium Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022 sebelumnya. Tidak hanya menunjukkan dukungan moral dan belasungkawa mereka, namun FIFA menunjukkan komitmen untuk membantu Indonesia untuk membentuk langkah-langkah komprehensif dalam praktik keamanan, protokol kepolisian, keterlibatan penggemar, penjadwalan pertandingan, bimbingan, dan praktik terbaik global untuk pelatihan staf keamanan saat pertandingan (FIFA, 2022).

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa FIFA tidak hanya menjalankan pemerintahannya dalam industri sepak bola hanya untuk meraup keuntungan, namun FIFA memegang nilai-nilai yang menuntunnya untuk bertindak. Hal ini erat kaitannya dengan identitas sosial FIFA, dimana nilai-nilai yang mereka pegang adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara-negara maju, spesifiknya negara-negara Eropa, dimana FIFA didirikan. Layaknya institusi dan organisasi barat lainnya, FIFA ingin menjadi pelopor dalam mempromosikan nilai-nilai HAM, seperti kampanye anti rasisme, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan dalam sepak bola.

2.1.3 Sanksi Sepak Bola FIFA untuk Operasi Militer Rusia di Ukraina

Pemberian sanksi kepada Federasi Sepak Bola Rusia atas operasi militer yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah suatu bentuk sikap yang jarang terjadi, namun bukan kali pertama dilakukan oleh FIFA. Pada sub-bab sebelumnya, penulis telah menyebutkan pemberian sanksi oleh FIFA atas konflik politik internal suatu negara, yaitu untuk Afrika Selatan di tahun 1955 untuk menerapkan kebijakan apartheid dan untuk Yugoslavia di tahun 1990 karena agresi pemerintahannya untuk negara-negara Balkan, khususnya Bosnia-Herzegovina. Tiga dekade lebih telah berlalu, dunia telah mengalami banyak perubahan dan konflik antar negara juga terjadi di berbagai belahan dunia, tetapi FIFA hanya memilih untuk menyikapi operasi militer Rusia di Ukraina yang mulai pada tanggal 24 Februari 2022.

Sebagai fakta latar belakang, pada tanggal 26 November 2021, jadwal Playoff Piala Dunia 2022 diumumkan, dan tim nasional Rusia pada saat itu dijadwalkan untuk melawan tim nasional Polandia pada tanggal 24 Maret 2022 (Court Arbitration of Sport, 2022: 3). Pemenang dari pertandingan tersebut akan bertanding lagi pada tanggal 29 Maret 2022 melawan pemenang dari pertandingan tim nasional Swedia dan Republik Ceko. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2022, Dewan Eropa mulai mengadopsi sebuah paket sanksi dan larangan bepergian untuk para pejabat negara Rusia dan berbagai individu dengan profil tinggi dari Rusia.

Pada tanggal 24 Februari 2022, konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai, Dewan Eropa mengutuk serangan militer tersebut. United Nations Security Council pun berupaya untuk mengadopsi sebuah resolusi untuk mengakhiri krisis di Ukraina, yang kemudian di Veto oleh Federasi Rusia. Pada tanggal 25 Februari,

Dewan Eksekutif IOC merilis sebuah pernyataan yang mengandung rekomendasi sebagai berikut :

“The IOC EB today urges all International Sports Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarus. They should take the breach of the Olympic Truce by the Russian and Belarusian governments into account and give the safety and security of the athletes absolute priority. The IOC itself has no events planned in Russia or Belarus. In addition, the IOC EB urges that no Russian or Belarusian national flag be displayed and no Russian or Belarusian anthem be played in international sports events which are not already part of the respective World Anti-Doping Agency (WADA) sanctions for Russia.[...]” (Olympics, 2022).

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2022, Asosiasi Sepak Bola Swedia mengunggah sebuah pernyataan di akun Twitter mereka sebagai berikut :

“SvFF’s message: The men’s national team will not play against Russia - regardless of where the match is played. The Federal Board also urges FIFA to cancel the play-off matches in March in which Russia participates” (Court Arbitration of Sport, 2022: 3).

Lalu pada tanggal 27 Februari 2022, Asosiasi Sepak Bola Polandia merilis pernyataan sebagai berikut :

“The Polish Football Association declares that, as a result of the brutal aggression of the Russian Federation on Ukraine and the ongoing war there, it does not see the possibility of competing with the Russian representation in the play-offs for promotion to the World Cup in Qatar in 2022, regardless of the name of the team consisting of Russian footballers and the place where the match will be played.

In the face of the Russian invasion of Ukraine, condemned almost everywhere in the world, this is the only decision we can make. The performance in the match against the Russian team would be shameful not only for our representatives, but also for the entire football community, it would be a denial of solidarity with the Ukrainian people. As a football association, we refuse to take part in the barrage matches in which the team from Russia plays.

At the same time, we call on the FIFA authorities to react immediately to the brutal violence we see every day on the territory of independent Ukraine. If the document “FIFA’s Human Rights Policy” is more than just words on paper, now is the time to put it into effect by excluding the Russian Football Association from qualifying for the 2022 World Cup in Qatar”(Court Arbitration of Sport, 2022: 3).

Di hari yang sama, Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko juga merilis pernyataan sebagai berikut:

“The FAČR Executive Committee unanimously approved the decision that the Czech national team will not play in any way in the 2022 World Cup qualification barrage against the Russian selection. [...]” (Court Arbitration of Sport, 2022: 4).

Kemudian, Uni Eropa menutup segala akses penerbangannya untuk maskapai Rusia. Dewan Federal Swiss juga mengadopsi sebuah paket sanksi. Masih pada tanggal 27 Februari 2022, Biro FIFA, dengan mengikuti rekomendasi dari IOC di tanggal 25 Februari 2022, merilis keputusan sebagai berikut (ditandai sebagai Keputusan Pertama) :

“1. No FIFA competition shall be played on the territory of Russia, until further notice and that matches instead be played on neutral territory.

2. The Member Association of Russia shall participate in any FIFA competition under the name: Football Union of Russia (RFU). The National Team of the Football Union of Russia shall participate without a flag and anthem until further notice.

3. No spectators shall attend matches in which the National Team of the Football Union of Russia features as host” (Schmidhauser, 2022:

Kemudian sebuah rilisan media mengikuti Keputusan Pertama FIFA, yang mengandung paragraf berikut :

“FIFA will continue its ongoing dialogue with the IOC, UEFA and other sport organisations to determine any additional measures or sanctions, including a potential exclusion from competitions, that shall be applied in the near future should the situation not be improving rapidly. The Bureau of the FIFA Council remains on standby to take any of these decisions.” (FIFA, 2022)

Pada tanggal 28 Februari 2022, Dewan Eksekutif IOC mengeluarkan sebuah resolusi (ditandai sebagai Resolusi IOC):

“1. In order to protect the integrity of global sports competitions and for the safety of all the participants, the IOC EB recommends that International Sports Federations and sports event organisers not invite or allow the

participation of Russian and Belarusian athletes and officials in international competitions.

2. Wherever this is not possible on short notice for organisational or legal reasons, the IOC EB strongly urges International Sports Federations and organisers of sports events worldwide to do everything in their power to ensure that no athlete or sports official from Russia or Belarus be allowed to take part under the name of Russia or Belarus. Russian or Belarusian nationals, be it as individuals or teams, should be accepted only as neutral athletes or neutral teams. No national symbols, colours, flags or anthems should be displayed. Wherever, in very extreme circumstances, even this is not possible on short notice for organisational or legal reasons, the IOC EB leaves it to the relevant organisation to find its own way to effectively address the dilemma described above. In this context, the IOC EB considered in particular the upcoming Paralympic Winter Games Beijing 2022 and reiterated its full support for the International Paralympic Committee (IPC) and the Games.

3. The IOC EB maintains its urgent recommendation not to organise any sports event in Russia or Belarus, issued on 25 February 2022.

4. The IOC EB has, based on the exceptional circumstances of the situation and considering the extremely grave violation of the Olympic Truce and other violations of the Olympic Charter by the Russian government in the past, taken the ad hoc decision to withdraw the Olympic Order from all persons who currently have an important function in the government of the Russian Federation or other government-related high-ranking position [...]” (Olympics, 2022)

Pada hari itu juga, Biro FIFA mengisukan sebuah keputusan yang kemudian berusaha dibanding oleh Federasi Sepak Bola Rusia (ditandai sebagai Keputusan Banding), yaitu untuk melarang partisipasi Rusia dalam Piala Dunia 2022. Keputusan tersebut diikuti oleh Resolusi yang disetujui oleh Parlemen Eropa mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina yang mendapatkan 637 suara mendukung, 13 suara yang menolak, dan 26 abstensi. Parlemen Eropa juga secara tegas menyambut keputusan FIFA yang melarang partisipasi Rusia dalam Piala Dunia. Tanggal 3 Maret 2022, FIFA mempertegas dasar dari Keputusan Banding sebagai berikut :

“Following the escalation of the conflict in Ukraine, the Bureau of the FIFA Council (hereinafter: the Bureau) adopted yesterday, 27 February 2022, a decision containing a number of measures to be taken with immediate effect, to urgently address this crisis and to deal with the emergency now faced.

In that decision, the Bureau also highlighted the fact that FIFA would continue to monitor and assess the developments of the conflict and also consider additional emergency measures if appropriate. Given the clear decisions by several FIFA member associations not to compete with the Russian national team in ongoing football competitions, FIFA, as the event organizer of the FIFA World Cup Qatar 2022™, needs to guarantee the smooth running of its flagship competition.

FIFA has a reasonable margin of discretion in decisions concerning the operation of its competitions and the participation of its member associations. This also allows FIFA to take into account cases of force majeure, such as acts of war.

First, it is an objective necessity that FIFA, as the organiser of the FIFA World Cup Qatar 2022™, ensures that the calendar of the ongoing preliminary competition is fully respected. Given that the FIFA World Cup Qatar 2022™ is only a few months away it is imperative that this calendar is not disrupted, thus jeopardising the efficient organization and smooth running of the matches due to take place over the next months.

Second, the decisions by several FIFA member associations and, most particularly, the Polish Football Association, the Swedish Football Association, and the Czech Football Association, not to compete against the Football Union of Russia team (in whatever form) (hereinafter: RUF) must be respected by FIFA. Those decisions are both fully understandable and cannot be criticized from either a legal or moral point of view.

It also is foreseeable that other member associations would take the same position as Poland, Sweden and Czech Republic, the consequences of which for FIFA World Cup Qatar 2022™ would be irreparable and chaotic.

Having considered all these factors, FIFA must act to guarantee the efficient organization and smooth running of its competitions, and particularly the FIFA World Cup Qatar 2022™.

Given these circumstances and based on article 2.b and 34.12 of the FIFA Statutes, and article 31 of the Regulations of the FIFA World Cup Qatar 2022™, Preliminary Competition, today, 28 February 2022, the Bureau decided to approve the following measure:

All teams of the FUR or otherwise affiliated to the FUR are suspended from participating in FIFA competitions until further notice and

until the situation improves sufficiently to allow teams of the FUR or otherwise affiliate to the FUR to be readmitted. In accordance with article 38 paragraph 3 of the FIFA Statutes, the above decision of the Bureau shall be ratified by the Council at its next meeting.” (Court Arbitration of Sport, 2022: 5-6).

Lalu pada hari yang sama, Federasi Sepak Bola Rusia mengundang FIFA untuk menyetujui prosedur dihadapan Court Arbitration of Sport (CAS) untuk mendapatkan hak mereka untuk meminta penggantian rugi yang mereka terima dari Keputusan (Banding) FIFA. Pada 8 Maret 2022, Biro Panitia Pelaksana Kompetisi FIFA mengisukan sebuah keputusan baru yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA (ditandai sebagai Keputusan Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia) :

“i. With respect to Path A of the European qualifiers for the FIFA World Cup 2022, the match between Scotland and Ukraine, currently scheduled for 24 March 2022, be postponed to the existing May/June window, and by virtue, the match between the winners of Scotland/Ukraine and Wales/Austria also be postponed to the same window.

iii. With respect to Path B of the European qualifiers for the FIFA World Cup 2022, Poland, who were scheduled to play Russia on 24 March 2022, shall be granted a bye and play the winner of Sweden/Czech Republic on 29 March 2022.” (Court Arbitration of Sport, 2022: 6)

Masih di hari yang sama, yaitu 8 Maret 2022, para menteri olahraga dari 37 negara, termasuk Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss dan Inggris menandatangani pernyataan bersama yang mendukung sanksi olahraga terhadap Federasi Rusia (need citation), khususnya keputusan, *“teams representing the*

Russian or Belarusian state should be banned from competing in other countries”

(Schmidhauser, 2022: 6).